



Jadi Prioritas

SEKRETARIS Daerah Kabupaten Sintang, Kartiyus menyatakan jika Selisih Lebih Anggaran (SILPA) APBD Perubahan 2025 bisa menjadi opsi untuk pemberian tunjangan kades dan Perangkat desanya.

Menurut Kartiyus, tuntutan Kades soal realisasi Perbup Peraturan Bupati Sintang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kades, perangkat desa dan BPD tidak bisa diakomodir di APBD murni 2025 karena sudah disahkan.

"Kita bersyukur, ya, pak bupati sudah menyetujui tuntutan para kades dan perangkatnya, tinggal kami TAPD menganggarkannya di APBD Perubahan 2025 karena gak bisa murni. Sudah ketok palu kemarin. Jadi mohon bersabar sedikit nanti tetap dibayarkan dari mulai bulan Januari-Desember 2025. Hanya menunggu perubahan APBd 2025 saja," ujar Kartiyus.

Kartiyus mengungkapkan, alasan Pemda belum merealisasikan Peraturan Bupati Sintang Nomor 2 Tahun 2022 ka-

rena ada kebutuhan lain yang harus diakomodir.

"Untuk belanja ADD desa, sebenarnya 10 persen saja dari APBD. Kami sudah kasih 19 persen sudah melampaui itu. Kemudian dari PAD 10 persen. Kelebihan PAD dihitung pakai target. PAD ndk pernah terealisasi. Ndak pernah kita minta kembali uangnya. Sebenarnya untuk tunjangan berapapun perangkat desa bisa, asal desa bisa mendapatkan PAD sendiri. Bisa bagi ke perangkat desa. Itulah dia otonomi desa. Tapi gak apa-apa desa kita belum ada yang mampu jadi kita bantu lewat APBD," ungkap Kartiyus.

Kartiyus bersama tim TAPD Kabupaten Sintang akan menghitung kebutuhan anggaran untuk merealisasikan tuntutan kades.

"Nanti kita hitung kembali kebutuhan mereka. Saya berharap dari perubahan nanti, Silpa kita prioritas untuk perangkat desa. Supaya terbayarkan. Gak apa-apa Silpa untuk mereka baru dibagi untuk pokir. Jangan untuk pokir semua," tegas Sekda. (Ags)